HUMAS UNIVERSITAS INDONESIA KLIPING

KLASIFIKASI : Universitas Indonesia
TEMA : "Civil Society" Perlu Dilihat dengan Pendekatan Budaya
SURAT KABAR/MAJALAH : Kompas

Hari Rabu Tanggal 30 Bulan Maret Tahun 2005 Halaman 6 Kolom 4-7

RINGKASAN:

Direktur Eksekutif Pusat Studi Jepang UI Bachtiar Alam PhD dalam seminar Sehari tentang *Okinawa and Asia in Age of Globalization: in search of a sustainable network of civil society*, di Kampus UI Depok menyampaikan bahwa *Civil society* atau masyarakat madani selama ini seringkali hanya di kenal sebagai organisasi atau kelompok non pemerintah. Tidak heran jika fokus wacana masyarakat madani kemudian jarang dilihat sebagai sebuah kebudayaan yang menekankan pluralisme, kemajemukan nilai, maupun kepentingan. Seminar ini juga dihadiri oleh Prof Noriyuki Suzuki dari Universitas Ryukyus Jepang, dan Prof Surichai WanKaeo dari Universitas Chulalongkorn, Thailand.

REKOMENDASI:

"Civil Society" Perlu Dilihat dengan Pendekatan Budaya

DEPOK, KOMPAS — *Civil society* atau masyarakat madani selama ini sering kali hanya di kenal sebagai organisasi atau kelompok nonpemerintah. Tidak heran jika fokus wacana masyarakat madani kemudian jarang dilihat sebagai sebuah kebudayaan yang menekankan pluralisme, kemajemukan nilai, maupun kepentingan.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia Bachtiar Alam PhD Seminar Sehari tentang *Okinawa and Asia in the Age of Globalization: in search of a sustainable network of civil society* di Kampus UI, Depok Selasa (29/3). Seminar ini juga menghadirkan Prof Noriyuki Suzuki dari Universitas Ryukyus Jepang, dan Prof Surichai WanKaeo dari Universitas Chulalongkorn Thailand.

"Di Indonesia wacana *civil society* dalam proses demokratisasi memang sering kali dikaitkan kemandirian dan agenda kemasyarakatan seperti yang dilakukan oleh LSM atau NGO. Padahal, inti dari *civil society* itu adanya budaya pluralisme, kemajemukan nilai, dan bisa menerima perbedaan," ujar Alam. Jika dilihat sebagai kebudayaan, menurut dia, maka *civil society* itu bisa dikonstruksi. Artinya, budaya yang harus muncul dalam sebuah *civil society* itu bisa untuk dijadikan pedoman yang diterima secara luas oleh masyarakat.

"Kebudayaan itu harus dikonstruksi. Kalau orang bilang korupsi bagian budaya kita, artinya kita mengatakan kebudayaan itu sudah statis padahal kebudayaan itu dinamis. Jika dinamis, maka kebudayaan antikorupsi bisa ditumbuhkan dalam masyarakat," ujarnya.

Misalnya, katanya lagi, dulu orang tidak mau memakai helm kalau naik motor, sekarang orang tidak akan nyaman naik motor tanpa helm. "Artinya, budaya itu bisa dibentuk, bisa dilakukan dengan peraturan undang-undang atau insiatif sendiri. Tentu dengan niat untuk punya kesadaran yang sama. Untuk itu, memang membutuhkan waktu," ujarnya.

Menurut Surichai, *civil society* dalam era global sering

mempunyai peran yang melampaui batas-batas negara. Pasalnya, ada nilai-nilai yang sama dan diterima sebagai pedoman bersama. "Tidak heran jika masyarakat dari berbagai negara, sering kali bisa mempunyai hubungan yang lebih akrab. Seperti komunitas perguruan tinggi yang menghargai intelektualitas, ujarnya.

Dalam kasus Okinawa dan Thailand, Noriyuki mengatakan, secara budaya sebenarnya masyarakat di dua daerah ini mempunyai kesamaan sejumlah budaya, yaitu mirip dengan daerah pinggiratan China. "Sekarang kesamaan itu tercermin dalam kegiatan NGO, pekerja, dan kegiatan pariwisata," ujarnya. (MAM)